

## Daftar Pustaka

### A. Buku

- Ali, Zainuddin. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimmly. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Perihal Undang-Undang*. Rajawali Pers.
- Fahmal, A. M. (2006). *Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*. UII Press.
- Fatoni, Abdurrahman. (2011). *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Rineka Cipta.
- Hadjon, Philipus M. (2008). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Huda, N., & Nazriyah, R. (2020). *Teori dan Pengujian Peraturan-Perundang-undangan*. Nusa Media.
- HR, R. (2017). *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers.
- Ilmar, Aminuddin. (2014). *Hukum Tata Pemerintahan*. Predana Media Group.
- Jeddawi, Murtir. (2013). *Hukum Administrasi Negara*. Total Media.
- Kansil, & Kansil, C. (2016). *Sejarah Hukum di Indonesia*. PT Suara Harapan Bangsa.
- Marzuki, P. M. (2007). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Group.
- Mukti, Fajar., & Achmad, Yulianto. (2019). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Ridwan. (2009). *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*. FH UII Press.
- Ridwan, Juniarso., & Sudrajat, Achmad Sodik. (2020). *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Nuansa Cendekia

- Sadi, Muhammad., & Budianto, Kun. (2021). *Hukum Administrasi Negara*. Kencana.
- Sibuea, Hotma P. (2011). *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Erlangga.
- Tjandra, Riawan. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Sinar Grafika.
- Utrecht, E. (1986). *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Pustaka Tinta Mas.

## B. Artikel Jurnal

- Andina, E., & Arifa, F. N. (2021). Problematika Seleksi dan Rekrutmen Guru Pemerintah di Indonesia. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 12(1), 85-105.
- Anggono, B. D., & Mardika, N. Y. (2021). Konsistensi Bentuk Dan Materi Muatan Surat Edaran Sebagai Produk Hukum Dalam Penanganan Covid-19. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(4).
- Astuti, D., & Winarni, A. T. (2023). Diskresi Perekrutan PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri) Berdasarkan Surat Menteri PANRB NO. B/185/M. SM. 02.03/2022 Tentang Status Kepegawaian Di Instansi Pemerintah Pusat Serta Pemerintah Daerah. *MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang*, 20(2), 149-169.
- Budiman, H., Yuhandra, E., & Taufik, L. I. (2024). Perlindungan Hukum Tenaga Honorer Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 15(01), 13-24.
- Hanum, C. (2020). Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Hukum Dan Masyarakat Madani*, 10(2), 138-153.
- Hasim, H. (2017). Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem. *Madani Legal Review*, 1(2), 120-130.
- Hukunala, E., Mustamu, J., & Rugebregt, R. V. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Honorer Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(3), 293-304.
- Latief, F. H., & Ka'bah, S. (2022). Dinamika Kebijakan Pemutusan Hubungan Kerja Honorer (PPDK) Oleh Bupati Morotai. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(24), 704-716.

- Lubis, S. (2007). Partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik. *Jurnal Demokrasi*, 6(1).
- Miftahusalam, A., Nuraini, A. F., Khoirunisa, A. A., & Pratiwi, H. (2022). Perbandingan Algoritma Random Forest, Naïve Bayes, dan Support Vector Machine Pada Analisis Sentimen Twitter Mengenai Opini Masyarakat Terhadap Penghapusan Tenaga Honorer. In *Seminar Nasional Official Statistics* (Vol. 2022, No. 1, pp. 563-572).
- Purnamawati, E., & Hijawati, H. (2022). Freies Ermessen dalam Pemerintahan Indonesia. *Solusi*, 20, 98-109.
- Purwoko, A. P. (2013). Pegawai Tidak Tetap: Tinjauan Literatur Sebagai Perbandingan dengan Praktek Pada Organisasi Publik di Indonesia Temporary Workers: Literature Review as Comparison to Pratices in Public Organizations in Indonesia. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS VOL*, 7(2).
- Silalahi, U. (2004). Komunikasi pemerintahan: mengirim dan menerima informasi tugas dan informasi publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(1).
- Simanungkalit, J. H. U. P. (2013). Penataan pegawai tidak tetap di lingkungan instansi pemerintah. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS*, 7(2), 40-53.
- Soehartono, S. Eksistensi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik Sebagai Dasar Pengujian Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara di Peradilan Tata Usaha Negara. *Yustisia*, 1(2).

### C. Hasil Penelitian

- Rivaldi, Rahmad Arif. (2021). *Kedudukan Tenaga Honorer dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Sarolangun Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara*. Universitas Andalas.
- Siregar, Diana Riski Sapitri. (2022). *Analisis Kebijakan Penghapusan Tenaga Honorer Bidang Pendidikan Tahun 2023*. Universitas IslamNegeri Syarif Hidayatullah.

### D. Internet

- DPD RI. (2022). Resah dengan SE Menpan-RB, Nakes Honorer Curhat ke Ketua DPD RI. <https://www.dpd.go.id/daftar-berita/resah-dengan-se-menpan-rb-nakes-honorers-curhat-ke-ketua-dpd-ri>

- Dzulvigor, Ahmad & Angga, Dita. (2022). Jumlah Honorer Lebih Banyak Dibanding ASN, Pemkab Nunukan Minta Kebijakan Khusus. *Kompas*. <https://regional.kompas.com/read/2022/06/07/155016678/jumlah-honorer-lebih-banyak-dibanding-asn-pemkab-nunukan-minta-kebijakan?page=all>
- Elvia, Elza. (2024). Jumlah Honorer Melebihi PNS, PJ Bupati Bangka: APBD Tidak Cukup untuk Belanja Pegawai. *Antara News*. <https://babel.antaranews.com/berita/435967/jumlah-honorer-melebihi-pns-pj-bupati-bangka-apbd-murni-tidak-cukup-untuk-belanja-pegawai>,
- Fikri, Ahmad. (2024). Menpan RB Janji Tak Ada PHK Saat Tenggat Penghapusan Tenaga Honorer. *Bantuan Hukum*. <https://bantuanhukum.or.id/pos-pengaduan-guru-honor-terdampak-cleansing-ditutup-kepastian-kerja-guru-honor-belum-jelas/>
- Hidayat, Rofiq. (2022). MPR Minta Pemerintah Kaji Ulang Kebijakan Penghapusan Tenaga Honorer. *Hukum Online*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mpr-minta-pemerintah-kaji-ulang-kebijakan-penghapusan-tenaga-honorer-lt62a6ed4a6aee3?page=1>
- Humas BKN. (2022). BPK Minta Instansi Validasi Ulang Data 152.803 Non-ASN Tidak Sesuai Ketentuan Pendataan. <https://www.bkn.go.id/bkn-minta-ppk-instansi-validasi-ulang-data-152-803-non-asn-tidak-sesuai-ketentuan-pendataan-2/>
- Humas MENPAN. (2022). Instansi Pemerintah Diharapkan Selesaikan Penanganan Pegawai Non-ASN di Tahun 2023 Sesuai Karakteristik Masing-Masing K/L/D: Tenaga Honorer Tetap Bisa Diatur dengan Pola Outsourcing. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/instansi-pemerintah-diharapkan-selesaikan-penanganan-pegawai-non-asn-di-tahun-2023-sesuai-karakteristik-masing-masing-k-l-d-tenaga-honor-tertetap-bisa-diatur-dengan-pola-outsourcing>,
- Indraini, Anisa. (2023). Pemerintah Batal Hapus Tenaga Honorer Noember 2023, Ini Alasannya. *Detik*. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6925116/pemerintah-batal-hapus-tenaga-honor-november-2023-ini-alasannya>
- Kemenag Sumsel. (2022). 18 Tahun Jadi Honorer, Japri Berharap Jadi ASN Pada Pendataan Non ASN Tahun 2022. <https://sumsel.kemenag.go.id/berita/view/158042/18-tahun-jadi-honor-japri-berharap-jadi-asn-pada-pendataan-non-asn-tahun-2022>

- LBH Jakarta. (2024). Pos Pengaduan Guru Honorer Terdampak Cleansing Ditutup: Kepastian Kerja Guru Honorer Belum Jelas. *Bantuan Hukum*. <https://bantuanhukum.or.id/pos-pengaduan-guru-honorer-terdampak-cleansing-ditutup-kepastian-kerja-guru-honorer-belum-jelas/>
- L, Raja Eben. (2021). Kasus Hervina dan Nestapa Kehidupan Guru Honorer : Dilema Antara Gaji Rendah, Pengabdian Tanpa Kepastian dan Cinta Pekerjaan. *BBC*. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56094473>
- Nugroho, Rosseno Aji. (2023). Pegawai Honorer Sisa 1,6 Juta di 2024, Gimana Nasibnya?. *CNBC*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231113132441-4-488586/pegawai-honorer-sisa-16-juta-di-2024-gimana-nasibnya>
- Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas. (2022). Wacana Instansi Pemerintah Tanpa Tenaga Honorer. [https://issuu.com/pusbindiklatren/docs/simpul\\_vol\\_44\\_lr\\_/s/21990637](https://issuu.com/pusbindiklatren/docs/simpul_vol_44_lr_/s/21990637)
- Ramdani, Iman Dani. (2022). Menilik Nasib Honorer di Tahun 2023. *Ombudsman*. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--menilik-nasib-honorer-di-tahun-2023>
- Redaksi. (2008). Surat Edaran Bukan Peraturan Perundang-Undangan. *Hukum Online*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/surat-edaran-bukan-peraturan-perundangundangan-hol18765/>
- Redaksi. (2015). Surat Edaran Kerikil dalam Perundang-Undangan. *Hukum Online*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/surat-edaran--kerikil-dalam-perundang-undangan-lt54b1f62361f81/>,
- Redaksi. (2022). Pemprov Banten Dinilai Abai, Ribuan Honorer Gelar Aksi Damai Minta Diperjuangkan. *Kompas*. <https://regional.kompas.com/read/2022/08/15/171735378/pemprov-banten-dinilai-abai-ribuan-honorer-gelar-aksi-damai-minta?page=all>
- Safitri. (2022). Pemkab Lumajang, Jumlah Honorer Lebih Banyak dari ASN. *Jawa Pos*. <https://radarjember.jawapos.com/lumajang/791110157/pemkab-lumajang-jumlah-honorer-lebih-banyak-daripada-asn>,
- Sailendra, Hanief. (2022). Respon Penghapusan Tenaga Honorer, Paguyuban TPK se-Jateng Gelar Konsolidasi di Kendal. *Halo Semarang*. <https://halosemarang.id/respon-penghapusan-tenaga-honorer-paguyuban-tpk-se-jateng-gelar-konsolidasi-di-kendal/>
- Silitonga, Garry Fishcer. (2022). Asas Lex Superior Derogate Legi Inferiori dan Kedudukan Surat Edaran dalam Perundang-undangan.

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknk-kisaran/baca-artikel/15099/Asas-lex-superior-derogate-legi-inferiori-dan-Kedudukan-Surat-Edaran-dalam-Perundang-undangan.html>

Yunika, Nila Chrisna. (2024). Ratusan Guru Honorar di Jakarta Dipecat Mendadak, Kok Bisa?. *Liputan 6*.  
<https://www.liputan6.com/news/read/5645886/ratusan-guru-honorar-di-jakarta-dipecat-mendadak-kok-bisa?page=4>

#### E. Lain-lain

BKN RI. (2022). *Statistik ASN Semester II 2022*.

BKN RI. (2024). *Statistik ASN Semester II 2024*.

DPR RI. (2023). *Isu Sepekan DPR RI Bidang Polhukam Opsi Minggu Ke-1 Juli 2023*.

DPR RI. (2022). *Laporan Singkat Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI 21 November 2022*

Kementerian Keuangan RI. (2024). *Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2025*.